



## **LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN SEMESTER I TAHUN 2022**

### **A. Pendahuluan**

Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level first line defense sedangkan Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola/mengendalikan Risiko dan potensinya. Salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko adalah Penanganan Risiko berdasarkan hasil Identifikasi & Analisis Risiko serta Evaluasi Risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Untuk memastikan penanganan risiko berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Penanganan Risiko maka dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Pengendalian Risiko ini merupakan bahan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko sebagai tindak lanjut dalam proses pengendalian risiko yang dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengendalian risiko yaitu setiap risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang mengacu kepada indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pelaksanaan pengendalian risiko melibatkan Unit Pemilik Risiko dan seluruh pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang memahami dan bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2022.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **E. Pengendalian Risiko**

Proses Pemantauan dan Reviu terhadap penanganan risiko yang dapat menghambat ataupun menggagalkan capaian tujuan organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah dilaksanakan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan target kinerja setiap triwulan. Pemantauan dan reviu tersebut mengacu kepada pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam rencana penanganan resiko yang telah disusun sebelumnya. Berikut progress pelaksanaan pengendalian risiko Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten :

## KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Semester I 2022 (Januari – Juni)

No	Sisa Risiko	Indikasi	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian			
				Output	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Setiap bagian /bidang belum mengetahui pengukuran indikator kinerja	Kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja, program dan anggaran pada 4 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Banten pada tanggal 23 – 28 Maret 2022</li> <li>- Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi capaian realisasi anggaran Triwulan I TA. 2022, tanggal 15 Maret 2022</li> </ul>	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kanwil Banten Semester I 2022 pada tanggal 29 Juni 2022	-	-
			Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	Jumlah Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) TA. 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM pada tanggal 8 – 10 Februari 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan Corporate University Kanwil Banten tentang Formulasi Perhitungan dan Penilaian Indikator Kinerja yang diikuti oleh seluruh Satker secara virtual pada 22 Juni 2022</li> <li>- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) di Bidang Pemasarakatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pemasarakatan pada tanggal 23 – 25 Juni 2022</li> </ul>	-	-
			Pelaporan hasil capaian kinerja	Dokumen pelaporan capaian kinerja	4	Tersusunnya dokumen laporan Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022	Tersusunnya dokumen laporan Pencapaian Kinerja Semester I 2022	-	-

No	Sisa Risiko	Indikasi	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian			
				Output	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Monev kepada notaris saat PPKM	Pembentukan Tim Pengawasan Notaris	SK Tim Pengawas Notaris (MPW/MPD)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode Tahun 2021-2024 Provinsi Banten Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-30.AH.02.07 Tahun 2021.</li> <li>- Pembentukan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12-5.AH.02.07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12-037.AH.02.07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Periode 2021-2024</li> </ul>	-	-	-
			Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya 12 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kota Serang dan Cilegon</li> <li>- Terlaksananya 80 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kota Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya 8 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kota Serang dan Cilegon</li> <li>- Terlaksananya 100 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kota Tangerang</li> </ul>	-	-

No	Sisa Risiko	Indikasi	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian			
				Output	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Terlaksananya 50 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kab. Lebak dan Pandeglang	- Terlaksananya 55 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Kab. Lebak dan Pandeglang		
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi pemerintah terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama	5	Terselenggaranya 2 kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat	Terselenggaranya 4 kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat	-	-
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	- Audiensi dengan Walikota Tangerang Selatan dalam optimalisasi pembentukan Perda, tanggal 21 Maret 2022 - Kegiatan Rapat Penyusunan Propemperda dengan DPRD Kota Tangerang, pada tanggal 22 Maret 2022	- Pelaksanaan 9 kegiatan koordinasi inventarisasi Propemperda tahun 2022 pada 8 Kab/Kota dan 1 Provinsi - Kanwil Banten menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kab. Tangerang pada tanggal 14 Juni 2022 di Hotel Fame Gading Serpong.	-	-
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum	Pembentukan Tim Pengawas Bantuan Hukum	SK Tim Pengawas Bantuan Hukum	1	- Diterbitkan SK Kepala Kantor Wilayah Banten No. W.12.67. HN.04.03 Tahun 2022 tentang Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Provinsi Banten TA. 2022	-	-	-

No	Sisa Risiko	Indikasi	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian			
				Output	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dilaksanakan secara menyeluruh	Kegiatan Sosialisasi tentang Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi	1	- Kegiatan Obroloan Peneliti (OPINI) tentang Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai perwujudan akses keadilan	-	-	-
			Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum	Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah	6		33 kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum Pidana pada 8 UPT Pemasarakatan, 9 Penerima Bantuan Hukum Perdata, dan 16 OBH sebagai pemberi bantuan hukum	-	-
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Berkurangnya jumlah PNPB atas Layanan Keimigrasian	Kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	Jumlah kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	4	- Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi capaian realisasi anggaran Triwulan I TA. 2022, pada tanggal 15 Maret 2022	- Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi target kinerja B06 dan capaian Perjanjian Kinerja Semester I 2022 pada tanggal 29 Juni 2022	-	-
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure	Penyusunan rencana penanganan risiko peristiwa force majeure atau pedoman teknis pencegahan/ penanganan peristiwa force majeure	Jumlah dokumen rencana penanganan/ pedoman teknis pencegahan/ penanganan peristiwa force majeure	1	-	Telah tersusunya dokumen Manajemen Risiko terkait peristiwa force majeure dan gangguan Kamtib pada 2 Satker yaitu LP I Tangerang, dan LP Perempuan Tangerang	-	-

No	Sisa Risiko	Indikasi	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian			
				Output	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelaksanaan Bintorwasdal UPT masyarakatan oleh Kantor Wilayah	Jumlah Kegiatan Bintorwasdal ke UPT Masyarakatan	64	Pelaksanaan Bintorwasdal ke UPT Masyarakatan selama periode Triwulan I (Jan-Mar) sebanyak 16 kegiatan	Pelaksanaan Bintorwasdal ke UPT Masyarakatan selama periode Triwulan II (April-Juni) sebanyak 16 kegiatan	-	-
			Pemanfaatan Teknologi informasi SIKAMPAS dalam pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban	Pelaporan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan UPT Masyarakatan berdasarkan aplikasi SIKAMPAS	4	Pada periode januari – maret, telah diterima sebanyak 2.811 Laporan Kamtib yang disampaikan petugas UPT Masyarakatan melalui SIKAMPAS	Pada periode April – Juni, telah diterima sebanyak 2.984 Laporan Kamtib yang disampaikan petugas UPT Masyarakatan melalui SIKAMPAS	-	-
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Kegiatan Bimtek pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan	3	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Masyarakatan pada tanggal 23-25 Maret 2022	Pelaksanaan kegiatan pengarahan pimpinan strategi peningkatan peran petugas pengamanan dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 di DIKPIM Tangerang	-	-
			Penerapan hukuman disiplin pegawai	Jumlah pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum	1	- Pada periode Januari – Maret 2022 telah diterbitkan 1 SK Hukdis tingkat sedang, dan 2 SK Hukdis tingkat ringan	- Pada periode April – Juni 2022 telah diterbitkan 16 SK Hukdis tingkat berat dan 1 SK Hukdi tingkat ringan	-	-

## F. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko

Pelaksanaan pengendalian risiko terhadap 8 risiko yang telah teridentifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Banten selama periode Semester I 2022 diantaranya :

1. Pengendalian risiko atas data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat  
Telah terlaksananya 3 kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, 3 kegiatan Bimtek/Sosialisasi pengukuran capaian target indikator kinerja, dan tersusunnya 2 dokumen laporan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Banten.
2. Pengendalian risiko atas rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris  
Telah diterbitkannya 2 dokumen berupa SK Tim Pengawas atas pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah (MPW dan MPD), dan terlaksananya 305 kegiatan pengawasan oleh MPD atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah Banten.
3. Pengendalian risiko atas Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah  
Pada Semester I 2022 telah terselenggaranya 6 kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.
4. Pengendalian risiko atas rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Terlaksananya 12 kegiatan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Wilayah Banten.
5. Pengendalian risiko atas rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum  
Telah diterbitkannya 1 dokumen berupa SK Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Provinsi Banten TA. 2022, pelaksanaan 1 kegiatan sosialisasi tentang Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai perwujudan akses keadilan, dan 33 kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum baik kepada penerima bantuan hukum maupun pemberi bantuan hukum.
6. Pengendalian risiko atas Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian  
Pelaksanaan 2 kegiatan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022.
7. Pengendalian risiko atas tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure  
Pada Semester I 2022, telah tersusunnya 2 dokumen tentang rencana pengendalian risiko atas peristiwa force majeure, terlaksananya 32 kegiatan



Bintorwasdal pada UPT Pemasyarakatan, dan Pelaporan Kamtib oleh petugas pemasyarakatan melalui SIKAMPAS sebanyak 5.795 laporan.

8. Pengendalian risiko atas Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas

Pada Semester I 2022, telah terlaksananya 2 kegiatan tentang pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, dan penerapan hukuman disiplin atas pelanggaran oleh pegawai berupa penerbitan sebanyak 20 SK Hukuman Disiplin dengan rincian 16 hukuman disiplin tingkat berat, 1 hukuman disiplin tingkat sedang dan 3 hukuman disiplin tingkat ringan.

## G. Kesimpulan

Berdasarkan tabel kegiatan pengendalian risiko, pada periode Semester I 2022 telah terlaksananya pengendalian risiko terhadap 8 risiko yang telah teridentifikasi dengan jumlah 419 kegiatan dan 28 dokumen pengendalian risiko. Pemantauan kegiatan pengendalian risiko dilakukan secara berkala tiap Triwulan selama periode tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko dan pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil pelaksanaan pengendalian risiko tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko sehingga target indikator kinerja dapat tercapai secara optimal.

Demikian Laporan Pengendalian Risiko Kantor Wilayah Banten periode Semester I tahun 2022 ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.



Serang, 30 Juni 2022  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001



### PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan
1	2	3	4	5	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	1, Tidak semua pegawai menerapkan Reformasi Birokrasi 2. Hasil capaian kinerja tidak dilaporkan secara berkala dan terukur
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	127 Permohonan	Tidak ada permasalahan
			Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI
		Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Kurang efektifnya penyelesaian pengaduan pelanggaran KI
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Lokus 2 Laporan	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah
4	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Peraturan Daerah bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	Tidak ada permasalahan
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Tidak ada permasalahan
			Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61		Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	
	6	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
Persentase anggota JDHIN yang berpartisipasi aktif				20%	Tidak ada permasalahan
6	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi
			Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	Tidak ada permasalahan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan
1	2	3	4		5
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	Belum tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada instansi pemerintah di Wilayah Banten
		Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas
7	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Tidak ada permasalahan
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	Tidak ada permasalahan
8	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	Rendahnya jumlah responden survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	Tidak ada permasalahan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	Pembatasan pencairan anggaran keimigrasian
9	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	Tidak ada permasalahan
			persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Keterlambatan penyampaian surat vonis/eksekusi dari instansi terkait
			persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	WBP tidak dapat mengikuti program integrasi
			persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
			Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	Tidak ada permasalahan
			Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi
			Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Tidak ada permasalahan
			Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	Tidak ada permasalahan
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	30%	Tidak ada permasalahan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	Kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan
			Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Tidak ada permasalahan
			Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	Tidak ada permasalahan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Output Program	Permasalahan	
1	2	3	4		5	
			Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	Andik tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal secara tuntas	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	
			Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa <i>force majeure</i> (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	
			Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	Tidak ada permasalahan	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa <i>force majeure</i> (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	Tidak ada permasalahan	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Rencana kerja tidak disampaikan secara rutin kepada Kantor Wilayah	
				Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tidak ada permasalahan
				Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	kurangnya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/diklat teknis terkait bidang yang dibutuhkan
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tidak ada permasalahan
				Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Tidak ada permasalahan

Serang, 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001



DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: Kantor Wilayah Banten : 2022										
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	1. Tidak semua pegawai menerapkan Reformasi Birokrasi 2. Hasil capaian kinerja tidak dilaporkan secara berkala dan terukur	1. Rendahnya penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah 2. Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Divisi Admin	1. Belum adanya pengawasan dan pendengaran terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	Internal	C	1. Tidak tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meraih predikat WBK/WBBM 2. Pelaporan capaian kinerja kepada kementerian tidak tepat waktu	Kementerian	1. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 2. SK Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 3. Movev Pembangunan ZI untuk memastikan Pembangunan ZI telah di implementasikan secara berkala 4. Internalisasi Pembangunan ZI secara rutin kepada pegawai melalui Apel, rapat, kegiatan sosialisasi, dll. 5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Risiko Pelaporan
2	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Divisi Yankum	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Movev kepada notaris saat PPKM	Internal	C	Rendahnya nilai kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan layanan	Kementerian	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Risiko Reputasi
3	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatanKI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta penyebaran melalui media cetak seperti brosur tata cara pendaftaran KI	Tidak ada	Risiko Operasional
4	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kurang efektifnya penanganan pengaduan pelanggaran KI	Lamanya Proses penanganan penyelesaian pengaduan	Divisi Yankum	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas PPNS di Bidang KI	Internal	C	Kurang optimalnya Tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelanggaran KI	Kemen-terian	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manejemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tidak ada	Risiko Reputasi
5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatanKI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta penyebaran melalui media cetak seperti brosur tata cara pendaftaran KI	Tidak ada	Risiko Operasional
6	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Divisi Yankum	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	Internal	C	Tidak terdapatnya Indikasi Geografis di Wilayah	Unit Utama	Bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendorong pendaftaran KI atas potensi indikasi geografis di wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Risiko Operasional
7	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian	Peraturan Daerah bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Divisi Yankum	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	Internal & Eksternal	UC	Peraturan Daerah tidak dapat di terapkan di wilayah	Kantor Wilayah	1. SOP No: W.12.PP.02.01-80 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Perda/ Perkada di Kantor Wilayah 2. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas Prolegda tahun yang akan datang 3. Sosialisasi dan publikasi kepada Pemerintah daerah tentang UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa harmonisasi pembentukan peraturan daerah harus melibatkan Kantor Wilayah	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Risiko Hukum
8	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada	Risiko Reputasi
9	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan administrasi pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Internal & Eksternal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tidak ada	Risiko Reputasi
10	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Divisi Yankum	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten	Kementerian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Risiko Reputasi
11	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Tidak adanya desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di Wilayah	Rendahnya partisipasi aktif Pemerintah daerah untuk membentuk Desa/Kelurahan sadar hukum	Divisi Yankum	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya desa/kelurahan sadar hukum	Eksternal	C	Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Wilayah	Unit Utama	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum 2. Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan kelompok sadar hukum di Wilayah 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan desa/kelurahan sadar hukum	Tidak ada	Risiko Kebijakan
12	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi	Keterlambatan pelaporan Program Aksi HAM	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi Panitia RANHAM di daerah	Internal & Eksternal	C	Tidak terlampornya capaian aksi HAM di daerah	Kantor Wilayah	SOP No: W.12.KP.08.02-2473 Tahun 2019 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	Tidak ada	Risiko Operasional

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Jumlah instansi pemerintah yang mendinklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Belum tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada instansi pemerintah di Wilayah Banten	Tidak terfasilitasinya pemohon penyandang Disabilitas	Divisi Yankum	Kurang mendukungnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berbasis HAM	Internal	C	Rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis HAM	Kantor Wilayah	Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi pemerintah tentang Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.	Tidak ada	Risiko Operasional
14	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas	Masyarakat belum memanfaatkan fungsi YANKOMAS	Divisi Yankum	Kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait peran YANKOMAS	Internal	C	Terlambatnya akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan HAM	Kantor Wilayah	1. SOP No: W.12.KP.08.02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, Penyuluhan Hukum pada kanal youtube, kemudahan layanan berbasis IT melalui aplikasi SIPKUMHAM, dan aplikasi JAWARA pada menu Klinik Hukum dan HAM	Tidak ada	Risiko Pelaporan
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rendahnya jumlah responden survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Data hasil survei IKM layanan Keimigrasian tidak valid	Divisi Imigrasi	1. Terbatasnya layanan keimigrasian saat pandemi 2. Tidak terpenuhinya jumlah responden minimum survei IKM layanan Keimigrasian	Internal & Eksternal	C	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat diragukan hasilnya	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan survey mandiri berbasis TI melalui survei Balitbangkumham 2. Menghubungi penerima layanan yang untuk mendapatkan feedback atas layanan keimigrasian	Tidak ada	Risiko Pelaporan
16	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Pembatasan pencairan anggaran keimigrasian	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Divisi Imigrasi	Berkurangnya jumlah PNPB Layanan Keimigrasian	Internal	UC	Tidak tercapainya sasaran target kinerja Keimigrasian	Kementerian	1. Pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran secara berkala 2. Pelaksanaan Rekon Keuangan secara berkala 3. Optimalisasi Belanja Anggaran untuk kegiatan prioritas	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Risiko Operasional
17	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Keterlambatan penyampaian surat vonis/eksekusi dari instansi terkait	Terlambatnya pelaksanaan usulan remisi	Divisi PAS	Surat vonis/eksekusi dari PT/MA tidak disampaikan tepat waktu	Internal & Eksternal	UC	WBP tidak mendapatkan Hak Remisi tepat waktu	Kementerian	1. Berkoordinasi secara rutin dengan instansi berwenang dalam pemenuhan surat vonis 2. Menyampaikan surat permintaan atas vonis/eksekusi secara rutin	Tidak ada	Risiko Pelaporan
18	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	WBP tidak dapat mengikuti program integrasi	Pelaksanaan program integrasi kurang optimal	Divisi PAS	WBP tidak memiliki penjamin sebagai syarat program integrasi	Internal	C	WBP tidak mendapatkan Hak Integrasi	Unit Utama	Pelaksanaan sosialisasi secara berkala kepada WBP tentang pentingnya program pembinaan integrasi	Tidak ada	Risiko Pelaporan
19	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP	Divisi PAS	1. Tidak terdapat anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan pembinaan dan pendidikan	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak merata secara menyeluruh kepada WBP	Unit Utama	1. Bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan	Tidak ada	Risiko Operasional
20	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Rendahnya jumlah WBP yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	Divisi PAS	1. Sedikitnya jenis pelatihan yang disediakan 2. Kurangnya minat WBP untuk mengikuti pelatihan	Internal	C	Kegiatan Pelatihan bersertifikasi WBP tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	1. Pelaksanaan sosialisasi pelatihan bersertifikasi kepada WBP 2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan 3. Berkoordinasi dengan seluruh UPT Pemasarakatan untuk penambahan kerjasama mitra kerja di wilayahnya	Tidak ada	Risiko Pelaporan
21	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	Terbatasnya mitra kerja dalam menunjang kegiatan pelatihan bersertifikasi	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi WBP	Divisi PAS	1. Tidak terdapat anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pendidikan 2. Kurangnya kompetensi petugas sebagai tenaga pengajar 3. Terbatasnya ruangan/tempat kegiatan pembinaan dan pendidikan	Internal	C	Pemenuhan hak pendidikan tidak merata secara menyeluruh kepada WBP	Unit Utama	1. Bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepada WBP 2. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pendidikan	Tidak ada	Risiko Operasional
22	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan	Rendahnya jumlah Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	Divisi PAS	Pendidikan keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat anak binaan	Internal	C	Kegiatan Ketrampilan kepada anak tidak terlaksana secara efektif	Unit Utama	Melakukan assesment untuk menyesuaikan minat dan bakat Anak binaan terhadap pelaksanaan kegiatan ketrampilan	Tidak ada	Risiko Pelaporan
23	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Andik tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal secara tuntas	Pemenuhan hak pendidikan kepada Andik kurang optimal	Divisi PAS	Singkatnya masa pidana Andik	Internal	C	Anak Binaan Sudah Bebas Sebelum menyelesaikan pendidikan	Unit Utama	Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan formal dan non formal baik didalam LPKA maupun di luar LPKA	Tidak ada	Risiko Pelaporan
24	Persentase pengaduan yang diselesaikan	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Monev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada	Risiko Operasional
25	Persentase pencegahan gangguan kamtib	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas 3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kementerian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui kegiatan corporate university	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Risiko Hukum

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada	Risiko Operasional
27	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	kurangnya kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Divisi PAS	Kurangnya pelatihan kepada petugas tentang penanganan pengaduan	Internal	C	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan	Unit Utama	1. SK Tim Penanganan Pengaduan 2. Internalisasi dan Pembinaan secara rutin kepada pegawai saat Apel, rapat, dan lainnya. 3. Pengawasan dan Pelaksanaan Movev secara rutin atas penanganan pengaduan	Tidak ada	Risiko Operasional
28	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	1. Belum terdapat pedoman Teknis dalam pencegahan dan penanganan peristiwa force majeure (Kebakaran, Banjir, dll) 2. Pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban tidak secara rutin 3. Rendahnya tingkat disiplin petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi masuknya barang terlarang kedalam Lapas 3. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Divisi PAS	1. Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure 2. kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	1. Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib 2. rendahnya integritas pegawai	Kementerian	1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; 2. Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT 3. Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 4. Mengusulkan Bimtek terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Pembinaan petugas melalui kegiatan corporate university	1. Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure 2. Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Risiko Hukum
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan	Potensi munculnya kembali gangguan Kamtib pasca pemulihan	Divisi PAS	1. Terbatasnya area sel hukuman 2. kurangnya alat yang menunjang pengamanan (borgol, HT, dll)	Internal	C	1. Menumpuknya WBP yang melanggar tata tertib pada area sel hukuman 2. Pelaksanaan pengamanan belum optimal	Kantor Wilayah	1. Pelaksanaan pembinaan kepada WBP melakukan pelanggaran 2. Pelaksanaan antisipasi gangguan kamtib dengan mengamankan WBP jika terjadi gangguan kamtib 3. membuat usulan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana keamanan	Tidak ada	Risiko Operasional
30	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Rencana kerja tidak disampaikan secara rutin kepada Kantor Wilayah	Pelaksanaan agenda kegiatan tidak sesuai rencana kerja	Divisi PAS	Penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan pada Kantor Wilayah atau Unit Pusat	Internal	C	Pelaksanaan target kinerja tidak tepat waktu	Kantor Wilayah	1. Membuat secara berkala surat permintaan rencana kerja seluruh Satker sebagai penyusunan agenda kegiatan di Wilayah 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana kerja	Tidak ada	Risiko Operasional
31	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	kurangnya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/diklat teknis terkait bidang yang dibutuhkan	rendahnya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Divisi PAS	Terbatasnya peserta Bimtek yang diselenggarakan oleh BPSDM	Internal	C	rendahnya kualitas SDM dalam menunjang capaian kinerja organisasi	Unit Utama	1. Membuat usulan kebutuhan Bimtek bagi pegawai 2. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai 3. Pelaksanaan kegiatan Corporate University untuk meningkatkan kualitas SDM	Tidak ada	Risiko Operasional



Serang, 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001



Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Nomor : W12.UM.01.01-685

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022

## PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko  
Periode Penerapan

: Kantor Wilayah Banten  
: 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6		8
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	3	9	<b>Risiko Rendah</b>
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	<b>Risiko Tinggi</b>
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	<b>Risiko Moderate</b>
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kecil	2	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	8	<b>Risiko Rendah</b>
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	<b>Risiko Moderate</b>
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	<b>Risiko Tinggi</b>
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	20	<b>Risiko Tinggi</b>
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	<b>Risiko Moderate</b>

Serang, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001



Matriks Analisis Risiko (Skala 5x5)			DAMPAK RISIKO				
			Pegawai	UPT	Kanwil	Unit Utama	Kementerian
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN	PASTI	5					
	HAMPIR PASTI	4				R2, R6	R7
	MODERATE	3				R3, R5	R8
	KECIL	2			R1	R4	
	SANGAT KECIL	1					

PROFIL RISIKO		INTERVAL
	RISIKO SANGAT RENDAH	0 - 5
	RISIKO RENDAH	6 - 10
	RISIKO MODERATE	11 - 15
	RISIKO TINGGI	16 - 20
	RISIKO SANGAT TINGGI	21 - 25

RESIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI	
RISIKO SANGAT RENDAH	0
RISIKO RENDAH	2
RISIKO MODERATE	3
RISIKO TINGGI	3
RISIKO SANGAT TINGGI	0

PENILAIAN INDEKS RISIKO	
TOTAL INDEKS RISIKO	93
NILAI INDEKS RISIKO	13,28571429
KATEGORI INDEKS RISIKO	Risiko Moderate



Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Nomor : W12.UM.01.01-685

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022

### INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko (Penyebab)	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	9	VII	6,8	1. Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai pada masing-masing bagian/bidang tidak mengetahui pengukuran indikator kinerja	4,5
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	16	II	12,0	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan Monev kepada notaris saat PPKM	8,0
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	12	VI	9,0	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	6,0
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	8	VIII	6,0	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	4,0
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	12	V	9,0	Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh	6,0
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	16	III	12,0	Berkurangnya jumlah PNBPN Layanan Keimigrasian	8,0
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	20	I	15,0	Belum adanya identifikasi dan rencana penanganan atas risiko peristiwa force majeure	10,0
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	15	IV	11,3	kurangnya pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atasan secara berjenjang atas pelaksanaan tugas dan fungsi	7,5

Serang, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

## RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Banten

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Data hasil capaian kinerja tidak valid dan akurat	5	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran	4	Maret - Desember 2022	Kepala Divisi Administrasi	-
				Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	Jumlah Kegiatan sosialisasi pengukuran/perhitungan capaian target indikator kinerja	1	Juni-Agustus 2022		
				Pelaporan hasil capaian kinerja	Dokumen pelaporan capaian kinerja	12	Januari – Desember 2022		
2	Rendahnya jumlah penyelesaian laporan pengaduan terhadap notaris	8	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawasan Notaris	SK Tim Pengawas Notaris (MPW/MKN)	1	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris di Wilayah	6	Januari – Desember 2022		
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	6	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi pemerintah terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama	5	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	4	Mengurangi Risiko	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	Januari s/d Oktober 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
5	Rendahnya penilaian indeks kepuasan atas layanan bantuan hukum	6	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawas Bantuan Hukum	SK Tim Pengawas Bantuan Hukum	1	April 2022	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
				Kegiatan Sosialisasi tentang Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi	1	Mei 2022		
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum	Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah	6	Maret - November 2022		
6	Rendahnya kinerja anggaran Keimigrasian	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	Jumlah kegiatan evaluasi rencana kinerja dan anggaran Keimigrasian	4	Januari – Desember 2022	Kepala Divisi Keimigrasian	
7	Tidak optimalnya penanganan gangguan Kamtib atas peristiwa force majeure	10	Mengurangi Risiko	Penyusunan rencana penanganan risiko peristiwa force majeure atau pedoman teknis pencegahan/ penanganan peristiwa force majeure	Jumlah dokumen rencana penanganan/pedoman teknis pencegahan/penanganan peristiwa force majeure	1	April-Juni 2022	Kepala Divisi Pemasarakatan	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Bintorwasdal UPT masyarakatan oleh Kantor Wilayah	Jumlah Kegiatan Bintorwasdal ke UPT Masyarakatan	64	Januari – Desember 2022		
				Pemanfaatan Teknologi informasi SIKAMPAS dalam pelaksanaan Bintorwasdal Keamanan dan Ketertiban	Pelaporan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan UPT Masyarakatan berdasarkan aplikasi SIKAMPAS	4	Januari – Desember 2022		
8	Potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas	8	Mengurangi Risiko	Kegiatan Bimtek pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan	3	Januari – Desember 2022		
				Penerapan hukuman disiplin pegawai	Jumlah pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum	1	Juni-Agustus 2022		

Serang, 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001